

KONTROVERSI GAYA KOMUNIKASI POLITIK PRESIDEN K. H. ABDURRAHMAN WAHID

Angela Ervina, Rachmat Kriyantono, Maulina Pia Wulandari

Prodi S2 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Brawijaya

E-mail: angela.ervina77@gmail.com, rachmat_kr@ub.ac.id,
mpiawulandari@gmail.com

Abstract

K.H Abdurrahman Wahid is a religious and political figure in Indonesia. As a religious leader Gus Dur was known as the Chair of the PBNU and the great ulama of the descendants of the Banu Hashim. As a politician, Gus Dur is the fourth President of the Republic of Indonesia. Gus Dur's political communication as a religious figure and the President was known to be controversial. The controversial rhetoric of political communication turns out to have a hidden meaning that can be expressed through the study of discourse analysis using the method presented by Teun A. van Dijk. This study uses an interpretive approach with a critical paradigm. The 2001 Presidential Decree became the main focus of the author in expressing the meaning contained in the controversial phenomenon. The results showed that controversial political communication carried out by Gus Dur turned out to save the people from unconstitutional actions.

Key words: *Political Communication, K.H Abdurrahman Wahid, Critical Discourse Study.*

Abstrak

K.H Abdurrahman Wahid merupakan tokoh agama dan politik di Indonesia. Sebagai tokoh agama Gus Dur dikenal sebagai Ketua PBNU dan ulama besar keturunan Bani Hasyim. Sebagai politikus Gus Dur adalah Presiden keempat Republik Indonesia. Komunikasi politik Gus Dur sebagai tokoh agama dan Presiden dikenal kontroversial. Retorika komunikasi politik yang kontroversial ternyata menyimpan makna tersembunyi yang dapat diungkapkan melalui studi analisis wacana dengan menggunakan metode yang disampaikan oleh Teun A. van Dijk. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretative dengan paradigma kritis. Dekrit Presiden 2001 menjadi focus utama penulis dalam mengungkapkan makna yang ada dalam fenomena kontroversial tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik kontroversial yang dilakukan oleh Gus Dur ternyata untuk menyelamatkan rakyat dari tindakan inkonstitusional.

Kata kunci: Komunikasi Politik, K.H Abdurrahman Wahid, Analisis Wacana.

Pendahuluan

KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan Presiden keempat Indonesia. Gus Dur menjabat sebagai

Presiden pada tahun 1999 – 2001. Gus Dur

merupakan keturunan Bani Hasyim yang

terkenal sebagai ulama dikalangan

Nahdhatul Ulama. Sebelum menjadi

Presiden, Gus Dur merupakan ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama. Saat menjadi Ketua PBNU Gus Dur terlihat dekat dengan Soeharto, namun kedekatan itu merenggang karena sikap kritisnya kepada pemerintah yang kinerjanya buruk saat itu.

Gus Dur dikenal sebagai ulama dan politikus yang sangat kontroversial (Barton, 2011; Ahmad, 2010). Pelabelan ini dikarenakan Gus Dur mempunyai posisi yang unik yaitu sebagai Ketua PBNU yang notabene sebagai organisasi masyarakat tradisonal terbesar di Indonesia bahkan dunia. Selain itu, Gus Dur dikenal sebagai kritikus pemerintah yang sangat konsisten ditengah sedikit sekali orang yang berani mengkritik pemerintah saat itu. Namun disisi lain, kalangan masyarakat Nahdhatul Ulama Gus Dur dianggap sebagai sosok yang baik. Meskipun dalam bidang politik tindakan dan pernyataanya selalu menimbulkan kontroversi publik (Mujiburrahman, 2009; Barton, 2011).

Gus Dur melakukan komunikasi politik yang kontroversi sebagai tokoh agama dan politikus. Ketika menjadi Ketua PBNU, Gus Dur menyampaikan pernyataan kontroversial terkait dengan pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Gus Dur saat

itu menolak bergabung dengan ICMI dikarenakan menurutnya memanipulasi politik Islam dan bahaya bagi perkembangan demokrasi Indonesia (Mujiburrahman, 1999; Barton, 2011; Rafick, 2008).

Sikap kontroversi tersebut terus dilakukan oleh Gus Dur meskipun telah menjadi Presiden yang notabene adalah pemimpin tertinggi pemerintahan di Indonesia. Beberapa sikap dan tindakan Gus Dur yang dianggap kontroversial adalah: menganggap anggota DPR sebagai kumpulan “*siswa taman kanak – kanak*” yang berujung pemakzulan sebagai Presiden, menggunakan kaos dan celana pendek ketika pemakzulan sebagai Presiden, pembubaran departemen social dan penerangan, Gus Dur menyambangi Soeharto setelah lengser, Gus Dur mengusulkan agar Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk dihapus, memecat Jusuf Kala dan Laksamana Sukardi dan mengeluarkan Dekrit Pembubaran Parlemen (Aliansyah, 2014). Selain itu, Gus Dur juga menyerahkan tugas-tugas yang bersifat administratif pemerintahan kepada wakil presiden setelah sidang MPR pada bulan Agustus 2000 yang berkaitan dengan kabinet baru.

Fenomena kontroversial ini menarik diteliti, karena jika disandingkan dengan teori Neustadt yang mengatakan bahwa kekuatan persuasi seorang pemimpin tidak hanya mengacu pada karisma ataupun argumentasi mendasar yang dimiliki, ataupun hanya dengan cara memerintah saja, namun akan menjadi relevan jika dilakukan dengan cara persuasi (Neustadt, 1960). Dalam konteks Gus Dur sebagai pemimpin justru seringkali mengundang perdebatan, seolah-olah keputusan atau tindakan yang diambil seringkali menemukan kendala-kendala yang tidak sinergi dengan pihak-pihak tertentu, sehingga menimbulkan gap diantara pihak yang berkepentingan.

Richard Neustadt dalam tulisannya tentang kekuatan presiden di Amerika mengatakan bahwa, kekuatan presidensial (presidensiil) adalah kekuatan untuk memersuasi (dalam Casteen III). Persuasi yang dilakukan bertujuan antara lain untuk membuat kesepakatan dengan pihak lain, dan hal ini akan menjadi suatu keuntungan yang besar yang bisa di dapat, karena adanya kewenangan dan status yang dimiliki oleh presiden terlebih berkaitan dengan kebijakan yang dibuatnya (Burke, 2016; Hargrove, 2001; Neustadt, 1960).

Simpulan yang didapat oleh peneliti dari deskripsi di atas, bahwa ada gap antara

komunikasi Gus Dur dan teori Neustadt, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui wacana (*discourse*) gaya komunikasi Gus Dur yang kontroversial tersebut terkait dengan komunikasi politiknya.

Tinjauan pustaka

Komunikasi politik

Komunikasi politik bukan bidang yang berdiri sendiri. Komunikasi politik terdiri dari disiplin ilmu politik dan ilmu komunikasi (Soukup, 2015). Selain itu, teori – teori yang digunakan dalam komunikasi politik juga dipengaruhi oleh ilmu psikologi. Soukup (2015) menjelaskan bahwa kajian ini semakin berkembang ketika Nimmo dan Sanders mulai membahas dan menjabarkannya. Teori – teori yang digunakan dalam ketiga disiplin ilmu tersebut mencakup: teori pemrosesan informasi, teori efek media, dan teori-teori subjektif yang mendasarkan pada pendekatan interpretasi atau dekonstruksi. Hal ini yang membuktikan bahwa komunikasi politik merupakan sebuah bidang kajian yang tidak berdiri sendiri dan sangat kompleks.

Beberapa ahli menjelaskan tentang komunikasi politik. Graber dan Smith (2015) menjelaskan bahwa kata kunci dalam komunikasi politik adalah pesan yang disampaikan dalam komunikasi

politik mempunyai dampak politik yang besar bagi orang, kelompok, pola pikir, lembaga, dan masyarakat secara luas dalam daerah tertentu. Komunikasi politik adalah suatu proses interaktif tentang transmisi dari informasi di antara para politikus, media dan public (Norris, 2014). Sedangkan Chaffe (1975) menyatakan bahwa komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam setiap proses politik.

Critical Discourse Analysis

Studi wacana kritis (*critical discourse studies*) adalah suatu perspektif, suatu pengambilan posisi atau sikap di dalam disiplin studi wacana yang melibatkan berbagai disiplin ilmu: analisis wacana, psikologi, sejarah, ilmu-ilmu sosial atau linguistik. Tujuan dari studi ini adalah mendemistifikasi ideology dan kepentingan yang sudah dibekukan dalam bahasa (Haryatmoko, 2016).

Bahasa memiliki peran yang sangat signifikan bagi para aktor politik (Woods, 2006; Renkema, 2009). Namun bahasa tidak akan memiliki peran apabila berdiri sendiri tanpa politisi (Renkema, 2009). Lebih lanjut Renkema (2009) menjelaskan bahwa kekuatan bahasa dapat dianalisis dari para politisi dengan studi kritis dan pengawasan dari dekat. Pemakaian bahasa dalam ranah politik memiliki efek yang

jauh dapat menyentuh yaitu dengan menggunakan CDA dan retorika (Kazemian & Hashemi, 2014).

Critical discourse analysis menekankan pada bahasa dalam konteks sosial – budaya dan asumsi ideologi yang dibangun melalui teks dan interaksi. Jorgensen dan Philips (2002) menjelaskan bahwa batasan dari analisis retorika ada pada interaksi politik dan eksplorasi untuk menemukan pola dari tujuan, minat, dan menggabungkan asumsi berdasarkan tindakan persuasi. Rogers (2011) menjelaskan bahwa CDA bisa dipraktekkan untuk memotret, menginterpretasi, menganalisis dan mengkritik konteks sosial dan ideologi yang tercermin dari teks. Tujuan CDA secara sistematis masuk ke dalam hubungan antara praktek wacana, bentuk struktural dari bahasa dan dunia sosial. Studi ini pernah digunakan untuk menganalisis pidato Obama (Kazemian & Hazemi, 2014).

Critical Discourse Analysis Teun A. Van Dijk

Metode analisis wacana digunakan untuk mengetahui makna yang tersembunyi dalam sebuah lambang. Model yang dapat digunakan untuk mengetahui makna tersebut diungkapkan oleh Teun A van Dijk. Lebih lanjut van

Dijk menjabarkan dalam tiga tingkatan. Pertama, struktur makro adalah makna global dari sebuah topik. Kedua, superstruktur yaitu kerangka suatu teks yang disusun secara utuh. Ketiga struktur mikro adalah makna yang dapat diamati melalui kata, kalimat, proposisi, anak kalimat dan sebagainya (Bungin, 2014).

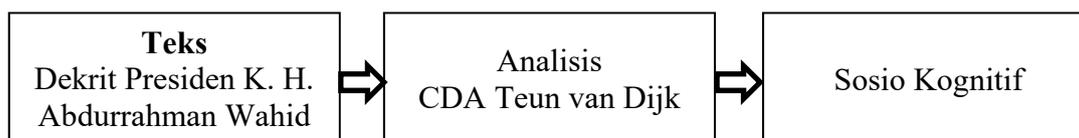
STRUKTUR WACANA	HAL YANG DIAMATI	UNIT ANALISIS
Struktur makro	TEMATIK (Apa yang dikatakan) Elemen: Topik/Tema	Teks
Superstruktur	SKEMATIS (Bagaimana pendapat disusun dan dirangkai) Elemen: Skema	Teks
Struktur Mikro	SEMANTIK (Apa arti pendapat yang ingin disampaikan) Elemen: Latar, detail, ilustrasi, maksud, pengandaian, penalaran	Paragraf
Struktur Mikro	SINTAKSIS (Bagaimana pendapat disampaikan) Elemen: Koherensi, nominaliasi, abstraksi, bentuk kalimat, kata ganti	Kalimat proposisi
Struktur Mikro	LEKSIKON (Pilihan kata apa yang dipakai) Elemen: Kata kunci, pemilihan kata	Kata
Struktur Mikro	RETORIS (Dengan cara apa pendapat disampaikan) Elemen: Gaya, interaksi, ekspresi, metafora, visual image	Kalimat proposisi

Analisis CDA menitikberatkan kepada studi representasi mental dan proses – proses yang terjadi pada pengguna bahasa dalam proses produksi serta pemahaman terkait wacana tertentu (Haryatmoko, 2016). Lebih lanjut Haryatmoko (2016) menjelaskan bahwa kognisi sosial melihat kaitan antara

struktur masyarakat dengan wacana dalam bentuk dominasi atau ketidakadilan sosial.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metodologi riset kualitatif yang berasal dari pendekatan interpretif atau subjektif dengan paradigma kritis. Paradigma kritis adalah merupakan salah satu varian yang



ada dalam pendekatan interpretif, selain pendekatan konstruktivis. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Creswell (2015) menyatakan bahwa penggaram adalah memadukan sudut pandang peneliti dengan sudut pandang yang ada dalam literature. Penelitian ini menggunakan model analisis wacana Teun A. van Dijk, yang menetapkan dua belas prinsip dasar, yaitu teks dan pembicaraan sungguh terjadi, ada konteks, wacana sebagai pembicaraan, wacana sebagai praktik sosial anggota-anggotanya, menghormati kategori-kategori milik pengguna bahasa, keberurutan, aspek konstruktivitas, tingkatan dan dimensi, makna dan fungsi, aturan-aturan bahasa, strategi-strategi yang dipakai dan kognisi sosial (Haryatmoko, 2016).

Kerangka Pemikiran

Peneliti menelaah poin-poin yang pernah menjadi suatu wacana kontroversi di masa jabatan Gus Dur sebagai presiden, dan memilih Teks Dekrit Presiden pada tanggal 23 Juli 2001 dengan menggali data-data dari buku dan berita terkait. Dengan menggunakan analisis wacana kritis Teun van Dijk dan pendekatan Sosio-kognitif, maka terbentuklah kerangka pemikiran berikut:

Pembahasan

Analisis Konteks

Konteks Maklumat pertama yang dikeluarkan oleh Gus Dur tanggal 28 Mei 2001 ketika menjabat sebagai presiden adalah bentuk dari reaksi ketidaksetujuannya kepada parlemen (DPR) yang juga merupakan retorika politik Gus Dur. Retorika merupakan titik tengkar atau disebut juga *stasis* dalam ranah *inventio* dan yang menjadi isu konfliktual (Maarif, 2015). Namun dalam wacana sidang istimewa, retorika presiden digunakan sebagai sarana untuk menolak gagasan yang bermula dari permintaan DPR kepada MPR atas kasus Buloggate dan Bruneigate yang menimpa Presiden, Presiden diminta pertanggungjawabannya dalam kedua kasus tersebut (Haramain, 2004).

Maklumat yang dibacakan oleh Yahya Cholil Staquf (Juru Bicara Presiden) memiliki konten yang bersifat umum, berisi perintah bagi Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil tindakan dan menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum. Konten Maklumat yang bersifat umum merupakan hasil dari kompromi beberapa pihak dengan Presiden, dan menjadi upaya

terbaik yang diambil dalam penanggulangan dari keinginan Gus Dur untuk mengeluarkan dekrit (Haramain, 2004).

Namun pada akhirnya Gus Dur tetap mengeluarkan Dekrit Presiden, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2001, dalam dekrit Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur melakukan pembekuan terhadap MPR RI dan DPR RI. Melalui dekrit situasi politik yang ingin dibentuk oleh Gus Dur adalah untuk menghindari terjadinya pergantian presiden secara inkonstitusional. Pergolakan terjadi di berbagai kalangan termasuk TNI dan POLRI terkait dengan dekrit Presiden. Walaupun terjadi pergolakan, seharusnya TNI dan POLRI tetap harus mendukung. Hal ini dikarenakan secara konstitusional Presiden merupakan panglima tertinggi.

Beberapa tokoh menentang dekrit Presiden yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Amien Rais menyatakan bahwa dekrit tersebut inkonstitusional dan melawan demokrasi yang diinginkan oleh rakyat (HFS, 2001). HFS (2001) juga menyebutkan beberapa tokoh seperti Nurcholish Madjid, KH. Syukron Makmun, Irvan Zidny juga menolak dekrit dikarenakan akan berbahaya bagi demokrasi. Dewi Fortuna Anwar menjelaskan bahwa dekrit yang

dikeluarkan oleh Gus Dur sangat bertentangan dengan sifat beliau yang sangat egaliter. Dekrit akan menjadikan Gus Dur sebagai pemimpin yang sangat otoriter (ORS, 2001). Arbi Sanit yang berpendapat Gus Dur hanya mengikuti alur yang dimainkan dari DPR yang ingin memainkan system parlementer (Madjid, 2012).

Hanya satu tokoh yang berbeda pendapat terkait dengan dekrit Presiden. Mahfudz MD menyatakan bahwa dekrit Presiden yang dikeluarkan oleh Gus Dur merupakan wewenang subjektif dari Presiden (Rurit, 2003). Rurit (2003) menjelaskan lebih lanjut bahwa dekrit sebagai wewenang subyektif dari presiden, dan jika dekrit diinterpretasikan efektif dalam pelaksanaannya maka pembuat dekrit bisa dianggap sebagai pahlawan namun jika keberadaan dekrit tidak didukung oleh tentara atau rakyat maka pembuat dekrit bisa dikatakan sebagai pelaku kudeta (Rurit, 2003).

Pemaknaan Global

Wacana kontroversial yang melekat pada Gus Dur pun diinterpretasikan demikian oleh banyak pihak dalam konteks dekrit, walaupun secara kontekstual tujuan dari dikeluarkannya dekrit adalah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Topik (makrostruktur)

atau dalam Cicero disebut dengan *topoi*, yang di dalam teks dekrit ini berupa ringkasan pesan dengan poin-poin sebagai berikut:

- 1). Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2). Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan dan menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dalam waktu 1 (satu) tahun.
- 3). Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Makroposisi dekrit 23 Juli 2001 ini menginginkan agar rencana sidang istimewa MPR tidak dilakukan, alasannya karena penilaian Gus Dur yang mengatakan bahwa sidang istimewa MPR tersebut tidak konstitusional (Mahfud, 2003). Lebih lanjut Mahfud (2003) menyatakan bahwa posisi Presiden sebagai kepala negara dalam sistem parlementer tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen, tapi justru Presiden yang bisa membubarkan DPR dengan alasan DPR tidak lagi dapat mewakili, sebagaimana sesuai dengan fungsinya sebagai wakil rakyat (Mahfud, 2003).

Makna Lokal

Makna lokal (semantic) mengacu ke makna dari isi dekrit yang menyebutkan bahwa presiden akan *membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* yang kemudian menjadi perdebatan banyak pihak, dan ingin mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat, sebagaimana ideologi demokrasi Pancasila yang dipegang teguh oleh Gus Dur.

Pembekuan DPR MPR oleh Presiden saat itu bertujuan untuk menghalangi sidang istimewa. Sidang istimewa saat itu bertujuan untuk pemakzulan Presiden oleh DPR MPR. DPR MPR saat itu beralasan bahwa suhu politik yang memanas dan kondisi yang tidak tentu perlu ada pemimpin baru. Hal ini juga diperkuat oleh Amien Rais yang saat itu Ketua MPR RI.

Beberapa ahli juga menyatakan bahwa secara akademis presiden diperbolehkan atau dapat mengeluarkan dekrit dengan berdasarkan pada suatu tindakan darurat yang dikenakan bagi keselamatan rakyat dan atau negara dari kehancuran, seperti adanya kemungkinan disintegrasi. Jelas keberpihakan terhadap rakyat dan keutuhan negara yang menjadi tujuan utama dari dekrit sebagaimana demokrasi

Pancasila yang menjadi ideologi dari Gus Dur.

Relevansi Struktur – Struktur Formal yang Tersamar

Logika teks yang tampak dalam dekrit ini, di awal teks dikeluarkannya Dekrit Presiden tertanggal 23 Juli 2001 dapat diidentifikasi bahwa adanya kebuntuan politik yang diakibatkan oleh krisis konstitusional berkepanjangan yang juga berdampak pada krisis ekonomi dan juga menghalangi penegakan hukum termasuk usaha pemberantasan korupsi, dan pertikaian kepentingan politik kekuasaan sebagai penyebabnya sehingga dengan begitu ketentuan yang ada dalam perundang-undangan diabaikan. Dan dengan personifikasi sebagai seorang Presiden, Gus Dur teguh memegang prinsipnya dengan tetap memegang ideologi Pancasila untuk tidak membiarkan bangsa ini terpecah belah, untuk tetap menjaga keutuhan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Haramain, 2004).

Retorika dalam teks dekrit terletak pada pesan-pesan yang menggunakan istilah-istilah seperti yang akan disebutkan di bawah ini agar pesan yang disampaikan menjadi efektif, dengan memberi tekanan dan keseriusan, juga menimbulkan efek ketegasan yang tidak bisa ditawar-tawar

lagi, keseriusan atas situasi darurat dan semua itu disampaikan dalam istilah-istilah berikut ini: “membekukan MPR dan DPR RI”, “mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat”, “mengambil tindakan”, “menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilu dalam waktu satu tahun”, “menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru”, “membekukan Partai Golkar”, “menunggu keputusan Mahkamah Agung”.

Kesimpulan

Gus Dur merupakan sosok yang kontroversial. Komunikasi politik Gus Dur selalu menimbulkan pertanyaan besar dan memiliki berbagai makna. Sikap dan tindakan Gus Dur yang kontroversial ini sudah dilakukan sejak era Soeharto. Pada saat itu Gus Dur sebagai Ketua PBNU banyak mengkritik kebijakan pemerintah yang memang memiliki kinerja lemah. Termasuk sikap Gus Dur yang enggan bergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dikarenakan menurutnya mematikan demokrasi.

Kontroversi Gus Dur terus berlanjut ketika menjadi Presiden. Beberapa kebijakan yang diambil sangat mengagetkan. Membubarkan departemen sosial dan departemen penerangan, mengunjungi Soeharto setelah lengser, Usulan untuk

pencabutan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang PKI, Pemberhentian Jusuf Kala dan Laksamana Sukardi, dan Dekrit Presiden 23 juli 2001.

Peneliti memilih dekrit Presiden untuk dibahas lebih dalam melalui studi analisis wacana melalui tulisan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa dekrit Presiden yang dikeluarkan tanggal 23 juli 2001 merupakan wujud retorika Gus Dur untuk menyelamatkan Indonesia. Hal ini nampak dalam analisis konteks, pemaknaan global, local, dan relevansi struktur – struktur formal yang tersamar.

Meskipun banyak menerima pertentangan dari berbagai pihak, Gus Dur tetap mengeluarkan dekrit Presiden untuk menghalangi DPR MPR melaksanakan sidang istimewa dengan agenda pemakzulan sebagai Presiden. DPR MPR menganggap Gus Dur bertanggung jawab atas kasus Buloggate dan Bruneigate. Sedangkan Gus Dur mengeluarkan dekrit dengan tujuan untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan pemakzulan yang dilakukan oleh DPR MPR merupakan hal yang inskonstitusional dan tidak dapat dibenarkan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. (2010). *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*. Yogyakarta: LKiS.
- Aliansyah, M. A. (2014, Maret 8). *Kisah Gus Dur pakai celana pendek Sisi Lain Istana*. Retrieved from Merdeka.com:
<https://m.merdeka.com/peristiwa/kisah-gus-dur-pakai-celana-pendek-sisi-lain-istana.html>
- Bahram Kazemian, S. H. (2014). *Critical Discourse Analysis of Barack Obama's 2012 Speeches: Views from systemic Functional Linguistics and Rhetoric*. *ProQuest*, 1178-1187.
- Barton, G. (2002). *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKis.
- Bungin, B. (2014). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Burke, J. P. (2016). *Presidential Power: Theories and Dilemmas*. Westview Press.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif, Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haramain, A. Malik. (2004). *Gus Dur, Militer, Dan Politik*. Yogyakarta: LKiS.

- Hargrove, E. C. (2001). *Presidential Power and Political Science*. ProQuest, 245.
- Haryatmoko. (2016). *Critical Discourse Analysis: Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- HFS. (2001, Mei 21). *Sebuah Bumerang Bernama Dekrit*. Retrieved from www.liputan6.com:
<https://m.liputan6.com/news/read/13322/sebuah-bumerang-bernama-dekrit>
- Jorgensen, M., & Philips, L. (2002). *Discourse Analysis as Theory and Method*. London: Sage Publications.
- Kazemian, B., & Hashemi, S. (2014). *Critical Discourse Analysis of Barack Obama's 2012 Speeches: Views from Systemic Functional Linguistics and Rhetoric. Theory and Practice in Language Studies, Vol. 4, No. 6*, pp. 1178-1187, June 2014.
- Madji, M. R. (2012). *Jurus Dewa Mabuk Ala Gus Dur: Kumpulan Rekam Jejak KH. Abdurrahman Wahid di Media Massa*.
- Mujiburrahman. (1999). *Islam and Politics in Indonesia: the political thought of Abdurrahman Wahid. Islam Christian Muslim Relations*, 339.
- Neustadt, R. E. (1960). *Presidential Power and The Modern Presidents: The Politics of Leadership from Roosevelt to Reagan*. New York: John Wiley & Sons.
- Norris, P. (2004). *Political Communications*. Encyclopedia of the Social Sciences,
- ORS. (2001, Juli 23). *Dekrit Dinilai Hanya Raungan Macan Ompong*. Retrieved from Liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/news/read/17004/dekrit-dinilai-hanya-raungan-macan-ompong>
- Paul A. Soukup, S. (2014). *Political Communication*. Communication Research Trends, 2-3.
- Rafick, I. (2008). *Catatan Hitam Lima Presiden*. Jakarta: Ufuk Publishing House.
- Renkema, J. (2009). *Discourse, of Course. An Overview of Research in Discourse Studies*. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins Publishing.
- Rurit, B. (2003, Desember 10). *Dekrit Adalah Wewenang Subyektif Presiden*. Retrieved from Tempo.co:
<https://nasional.tempo.co/read/34073/dekrit-adalah-wewenang-subyektif-presiden>
- Woods, N. (2006). *Describing Dscourse*. New York: Horder Education.